

# RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 2/2015

**MUSRENBANG RPJMD  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016**  
Peningkatan dan Pemertajahan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk  
Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan  
Serta Mendorong Percepatan Pembangunan Konektivitas Wilayah  
Kalimantan Barat



Musrenbang RKPD 2016 Kabupaten Kubu Raya  
Aula Kantor Bupati Kubu Raya-Sungai Raya, 25 Maret 2015



## Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com) HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

# Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Proses Perencanaan dan Sinergi *Stakeholders*
- Struktur RPJMN 2015-2019
- Dimensi Pembangunan Manusia
- Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
- Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
- Perencanaan Pembangunan Wilayah Kalimantan 2015-2019





# Siklus Manajemen Pembangunan



# Proses Perencanaan



## **Pendekatan Politik:**

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



## **Proses Teknokratik:**

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



## **Partisipatif:**

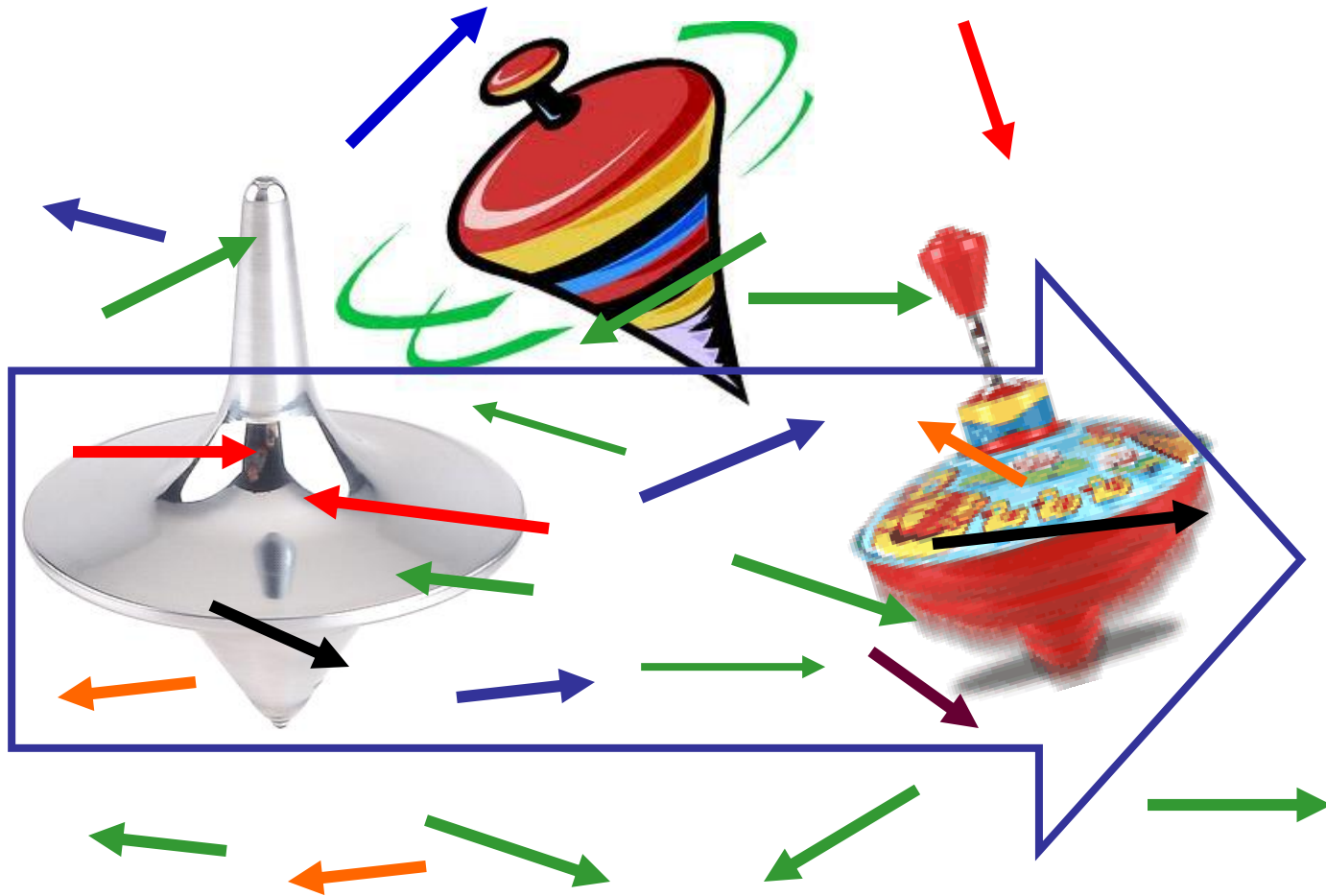
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



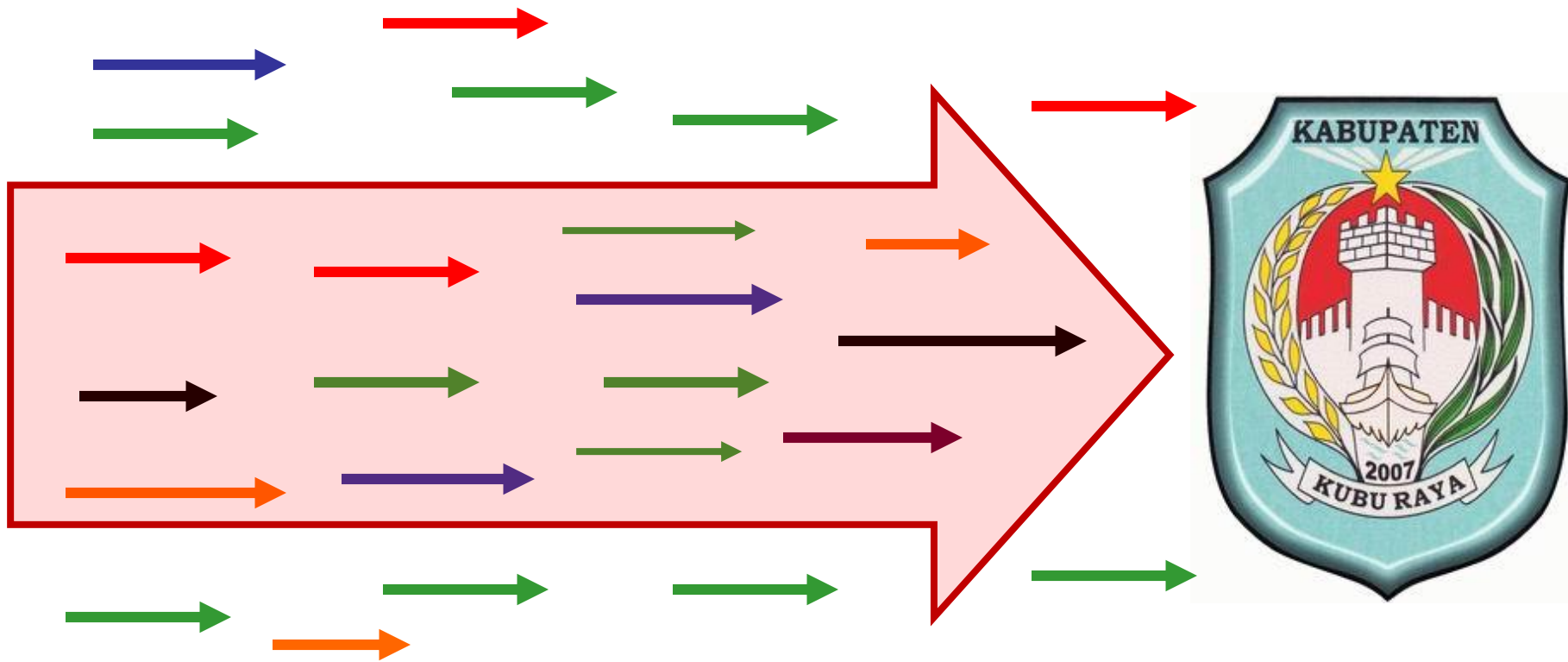
## **Proses top-down dan bottom-up:**

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

# Sinergi Stakeholders



# Sinergi *Stakeholders*







# Struktur RPJMN 2015-2019





# Dasar Hukum

## Penyusunan RPJMN 2015-2019

### 1. UU 25/2004 tentang SPPN:

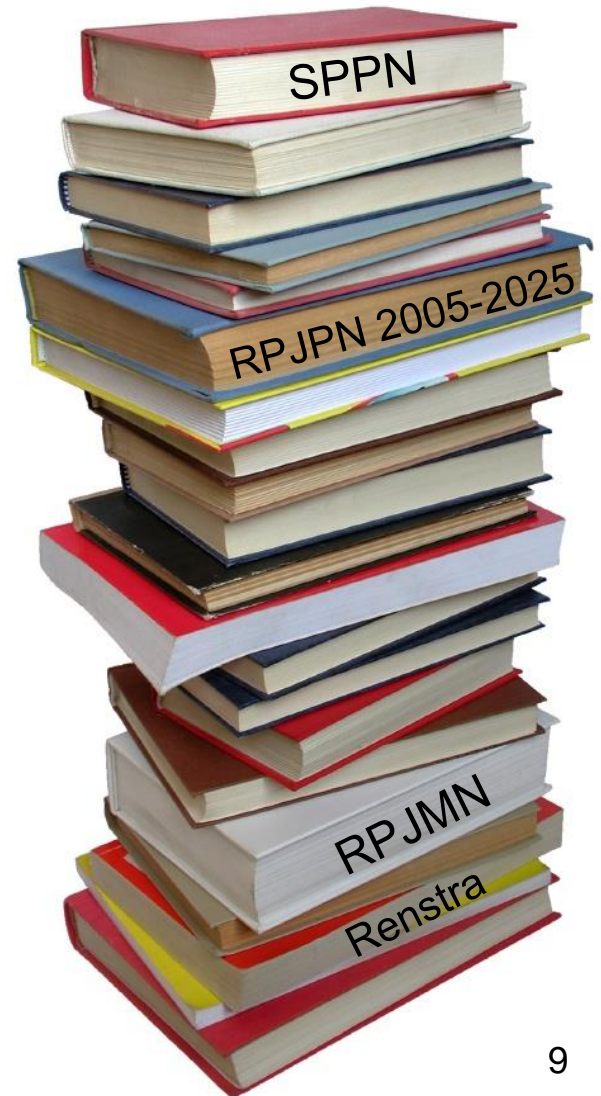
Pasal 19 ayat 1:

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.

### 2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025

Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019):

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.



# Dokumen RPJMN 2015-2019



## **BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL**

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum
3. Lingkungan Strategis
4. Kerangka Ekonomi Makro
5. Kebijakan Pembangunan Nasional
6. Agenda Pembangunan Nasional
7. Kaidah Pelaksanaan

## **BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG**

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
2. Pembangunan SOSBUD dan Kehidupan Beragama
3. Ekonomi
4. Bidang IPTEK
5. Bidang Politik
6. Bidang HANKAM
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Penyediaan SARPRAS
10. Bidang Pengelolaan SDA dan LH

## **BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH**

1. Wilayah Nasional
2. Wilayah Papua
3. Wilayah Maluku
4. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
5. Wilayah Pulau Sulawesi
6. Wilayah Pulau Kalimantan
7. Wilayah Pulau Jawa -Bali
8. Wilayah Pulau Sumatera



# Struktur RPJMN 2015-2019

## VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA  
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam  
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam  
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam  
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

# Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



# NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

# Trisakti

## I. Berdaulat dalam Bidang Politik

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.



# Trisakti

## II. Berdikari dalam Bidang Ekonomi

1. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.

# Trisakti

11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

## III. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

# Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti

## VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

### 7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
---	--	--	--	----------------------	--	--

### NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
--	---	---	---	--	--	--	---	---

#### BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi-115 Prioritas Utama)

#### BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi)

#### BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi)

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4)</li> <li>2. Memperkuat sistem pertahanan negara (4)</li> <li>3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8)</li> <li>4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)</li> <li>5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7)</li> <li>6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6)</li> <li>7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11)</li> <li>8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6)</li> <li>10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7)</li> <li>11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42)</li> <li>12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM</li> <li>2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan</li> <li>3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas.</li> <li>4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah &amp; membangun regulasi mewajibkan CSR &amp;/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.</li> <li>5. Membangun pemberdayaan buruh</li> <li>6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional</li> <li>7. Penguatan investasi domestik</li> <li>8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara</li> <li>9. Membangun infrastruktur</li> <li>10. Membangun ekonomi maritim</li> <li>11. Penguatan sektor kehutanan</li> <li>12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan</li> <li>13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan</li> <li>14. Membangun karakter dan potensi wisata</li> <li>15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional</li> <li>16. Pengembangan industri manufaktur</li> </ol>
---	--	--



# Strategi Pembangunan

## NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelempok  
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan  
Penegakan Hukum

Keamanan dan  
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

# Sasaran Makro

Indikator	2014* (Baseline)	2019
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	76,3
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat <sup>1</sup>	0,55	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,36
▪ Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
▪ Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
1. Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
2. Pekerja informal	1,3 juta	3,5 juta
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	72.217
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%

1) *Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat*

\*) *Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014*

# Dimensi Pembangunan Manusia





# Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

## Pendidikan

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pendidikan		
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)	8,8 (tahun)
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1%	96,1 (%)
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4%	68,4 (%)
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,60

## Arah Kebijakan

### Pendidikan

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas
3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

# Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

## Pembangunan Kesehatan

No	Indikator	2014 (Baseline)	2019
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>		
	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	346 (SDKI 2012)	306
	2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	32,9 (2013)	28
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>		
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	2. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2013)	<0,5
	3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4(2013)	15,4
	5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun	7,2 (2013)	5,4
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>		
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
	2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
	3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600

### Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

# Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

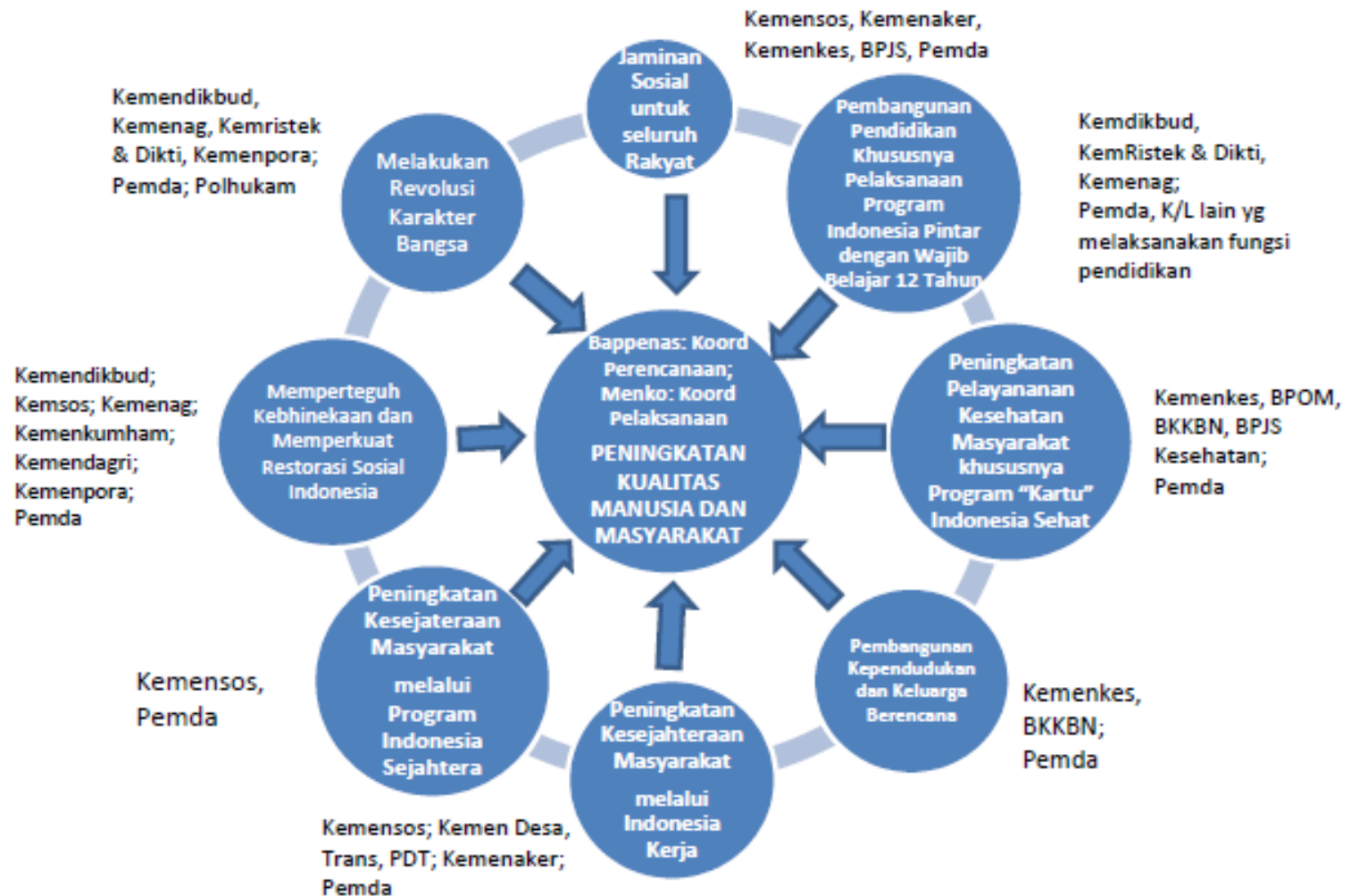
## Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Akses Air Minum Layak	70%	100%
Akses Sanitasi Layak	60,9%	100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha	0 Ha
Kekurangan Tempat Tinggal ( <i>Backlog</i> ) berdasarkan Perspektif Menghuni	7,6 Juta	5 Juta

### Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

# Pembangunan Manusia dan Masyarakat





# Revolusi Mental







# Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan



# Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

## Kedaulatan Pangan

INDIKATOR	2014 (baseline)	2019
<b>Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan</b>		
- Padi (Juta Ton)	70,6	82,0
- Jagung (Juta Ton)	19,13	24,1
- Kedelai (Juta Ton)	0,92	2,6
- Gula (Juta Ton)	2,6	3,8
- Daging Sapi (Ribu Ton)	452,7	755,1
- Produksi perikanan (juta ton)	12,4	18,8
<b>Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:</b>		
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,89
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	304,75
- Pembangunan waduk)*	21	49

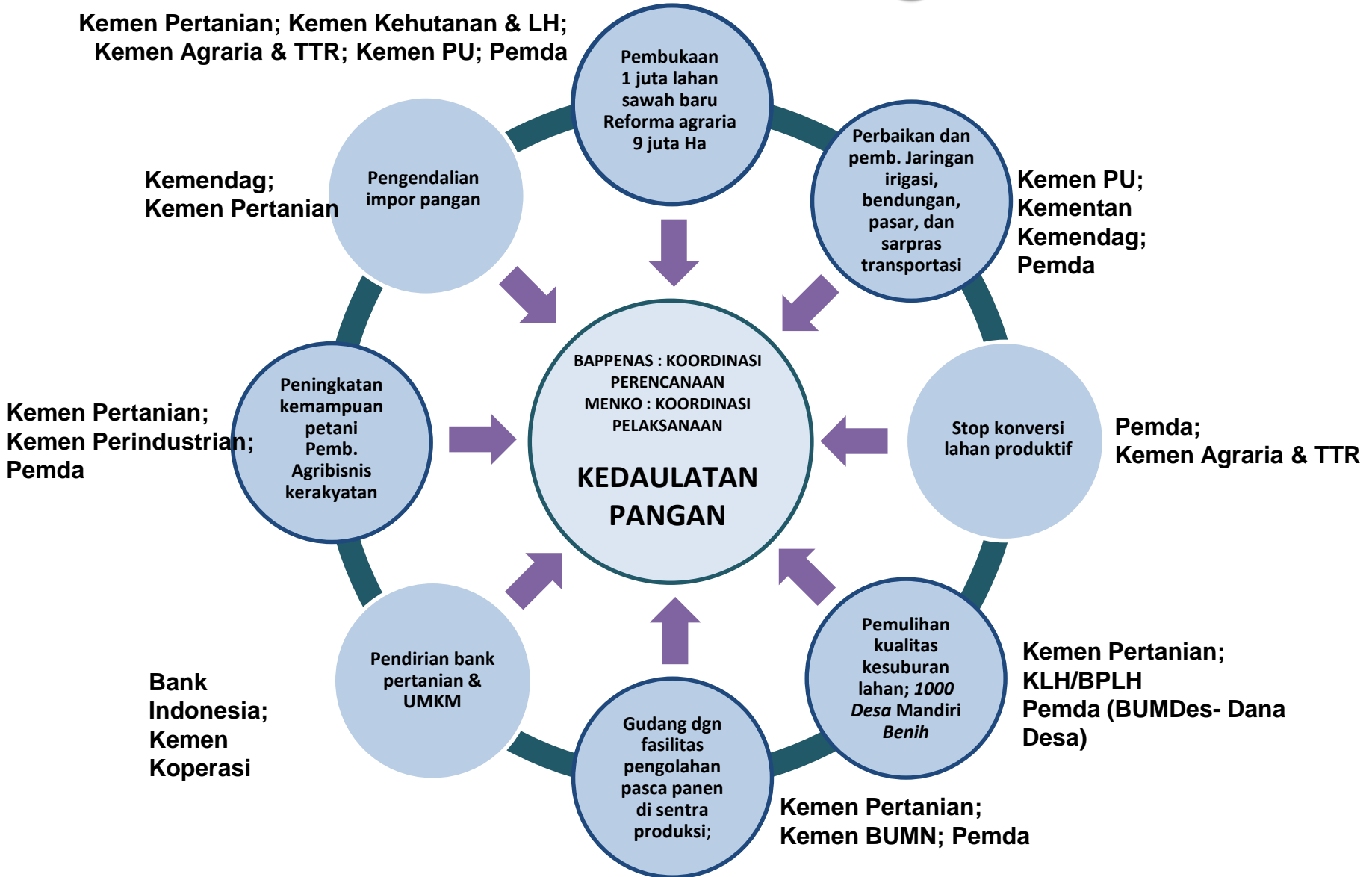
### CACATAN:

**Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi.** Untuk ke-4 tahun fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

### ARAH KEBIJAKAN:

- Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi:** (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; **Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)\*\***
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan:** (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan.
- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:** (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan:** (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

# Kedaulatan Pangan





# Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

## Kedaulatan Energi

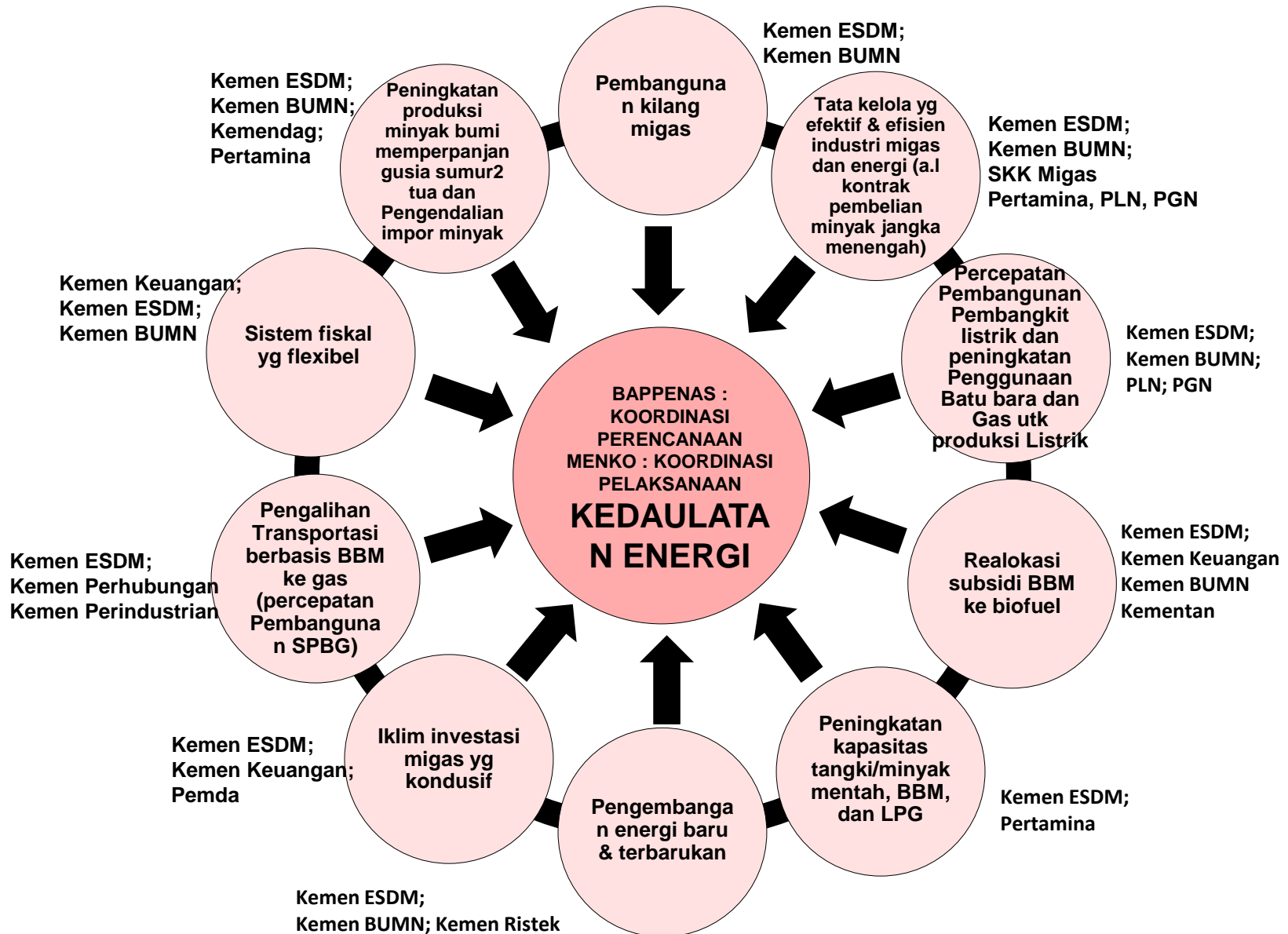
INDIKATOR	2014 (baseline)	2019*
Rasio elektrifikasi	81,5%	96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	1.200KWh
Peningkatan Produksi SD Energi:		
- Minyak Bumi (ribu BM/hari)	818	700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.295
- Batubara (Juta Ton)	421	400
Penggunaan DN (DMO):		
- Gas bumi DN	53%	64%
- Batubara DN	24%	60%
Regasifikasi onshore (unit)	-	6
Pembangunan FSRU (unit)	2	3
Jaringan pipa gas (km)	11.960	17.960
Pembangunan SPBG (unit)	40	118
Jaringan gas kota (sambungan rumah)	200 ribu	1 jt
Pembangunan kilang baru (unit)	-	1

\* Dengan badan usaha

## ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

# Kedaulatan Energi



# Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

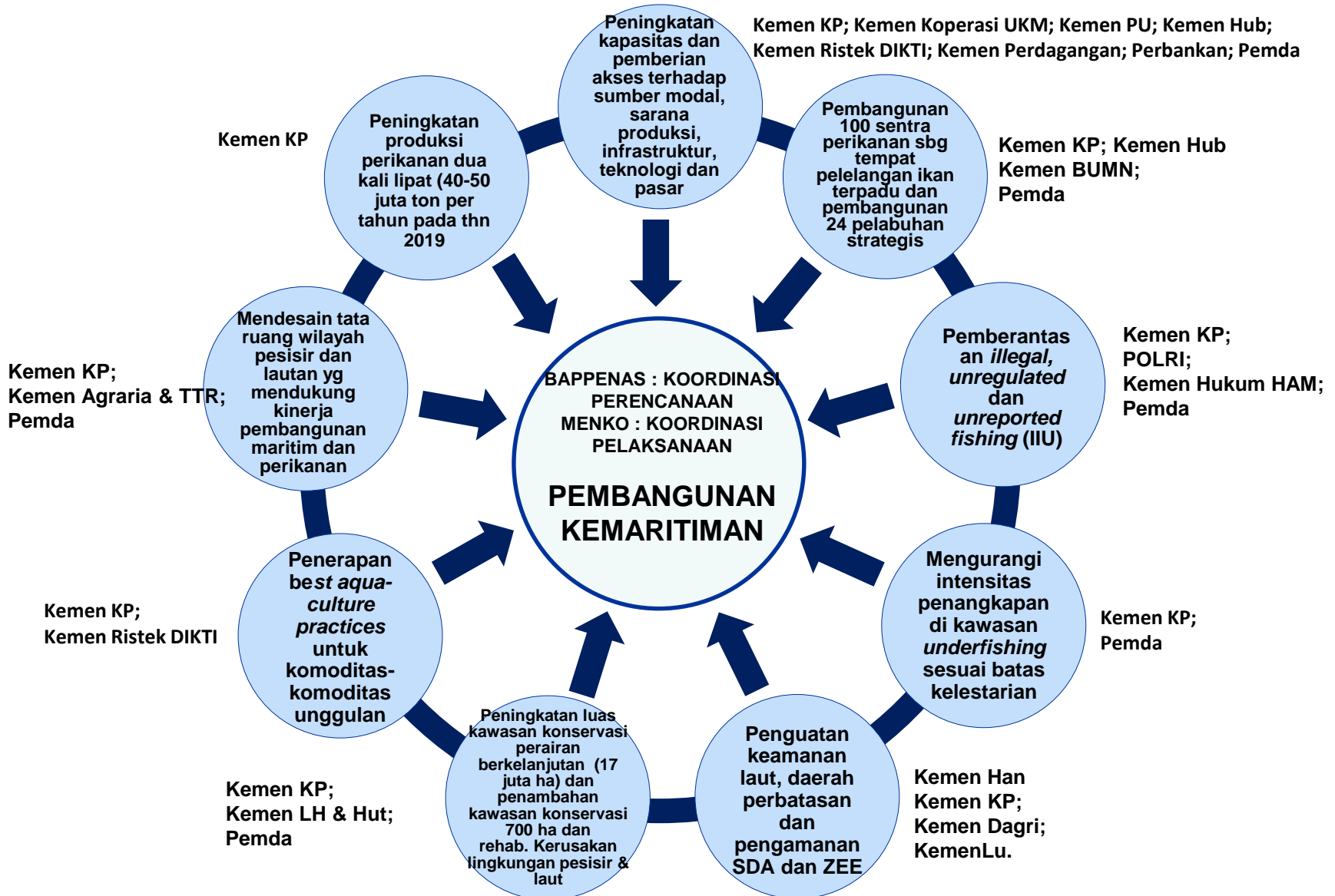
## Maritim dan Kelautan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
<b>Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim</b>		
▪ Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	17.466 (Selesai th 2017)
▪ Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	9 negara
<b>Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar</b>		
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	87%
<b>Membangun Konektivitas Nasional:</b>		
▪ Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	--	24
▪ Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	270
▪ Pembangunan kapal perintis	50 unit	104 unit
<b>Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan</b>		
▪ Produksi hasil perikanan (juta ton )	22,4	40-50
▪ Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	24 unit
▪ Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	20 juta ha

### ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan lptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

# Pembangunan Kemaritiman





# Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

## Pariwisata dan Industri

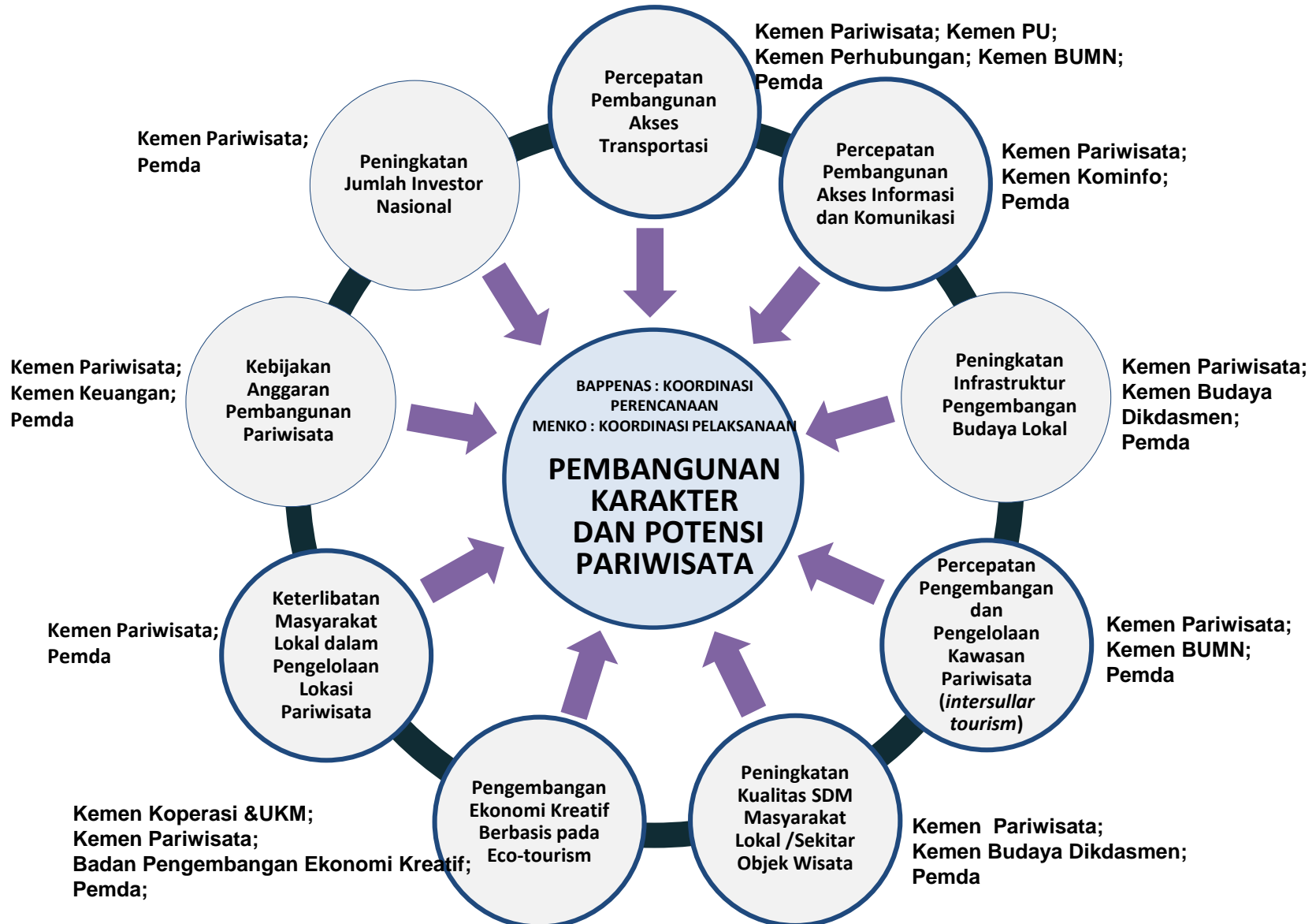
INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
<b>Pariwisata</b>		
▪ Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
▪ Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 juta	20 juta
▪ Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	275 juta
▪ Devisa (triliun rupiah)	120	260
<b>Industri</b>		
Sasaran Pertumbuhan:		
▪ Industri (%)	4,7	8.6
▪ Kontribusi dalam PDB	20,7%	21,6%
▪ Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar	-	9.000 unit*

\* Kumulatif 5 tahun

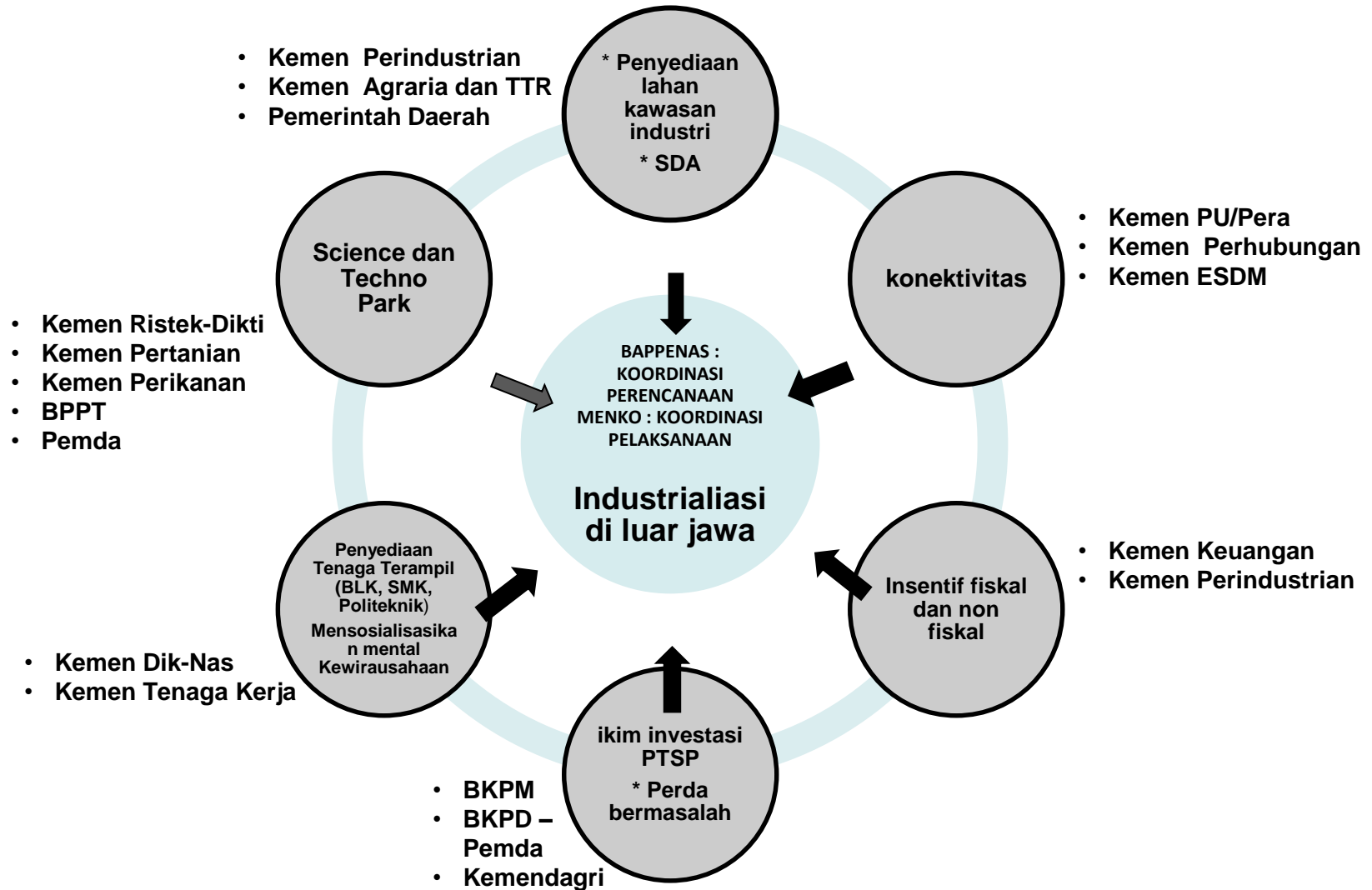
### ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjdai fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

# Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



# Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa





# Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan



# Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)		
▪ Kepemilikan Jaminan Kesehatan	86%	100%
▪ Akses Pangan Bernutrisi	60%	100%
▪ Akses thd Pelayanan Keuangan	4,2%	25%
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)		
▪ Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan kerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianya sarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usaha mikro/kecil		
Peningkatan daya saing tenaga kerja		
▪ Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)		10 juta (rata-rata 2 juta/thn)
▪ Persentase tenaga kerja formal	40,5%	51,0%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
▪ Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
▪ Pekerja Informal	1,3 juta	3,5 juta
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja		
▪ Jumlah pelatihan	1.921.283*	3.552.950**
▪ Jumlah sertifikasi	576.887*	2.280.764**
▪ Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	30,0%	42,0%
▪ Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	5,0%	25,0%

## SASARAN:

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 7,0%-8,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 4,0%-5,0% di tahun 2019.

## ARAH KEBIJAKAN:

- Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas
  - Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas
  - Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi
  - Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial
- Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
  - Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan dan perbaikan desain program: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KKS)
  - Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal
  - Penguatan kelembagaan sosial
- Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar
  - Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar
  - Peningkatan jangkauan layanan dasar
  - Pengembangan dan penguatan sistem monev terkait penyediaan layanan dasar
- Pengembangan penghidupan berkelanjutan
  - Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro
  - Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
  - Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha
  - Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

# Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

Indikator	2014 (Baseline)	2019
<b>Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</b>		
a. Penurunan desa tertinggal		s.d. 5,000 desa tertinggal
b. Peningkatan desa mandiri		paling sedikit 2,000 desa
<b>Pengembangan Kawasan Perbatasan</b>		
a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/ PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)
b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/ terdepan

## ARAH KEBIJAKAN:

### Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi.
3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.
4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.
5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi
6. Penguatan Pemerintahan Desa
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.
8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

### Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

# Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

Indikator	2014 (Baseline)	2019
<b>Pembangunan Daerah Tertinggal</b>		
a. Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42
b. Kabupaten terentaskan	70	80
c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *)	7,24%
d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	14,0%
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	69,59
<b>Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa</b>		
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa	7	14
b. Kawasan Industri	n.a.	14
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4

- rata-rata 2010-2014
- \*\* di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

## ARAH KEBIJAKAN:

### Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.

### Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA → (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

# Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

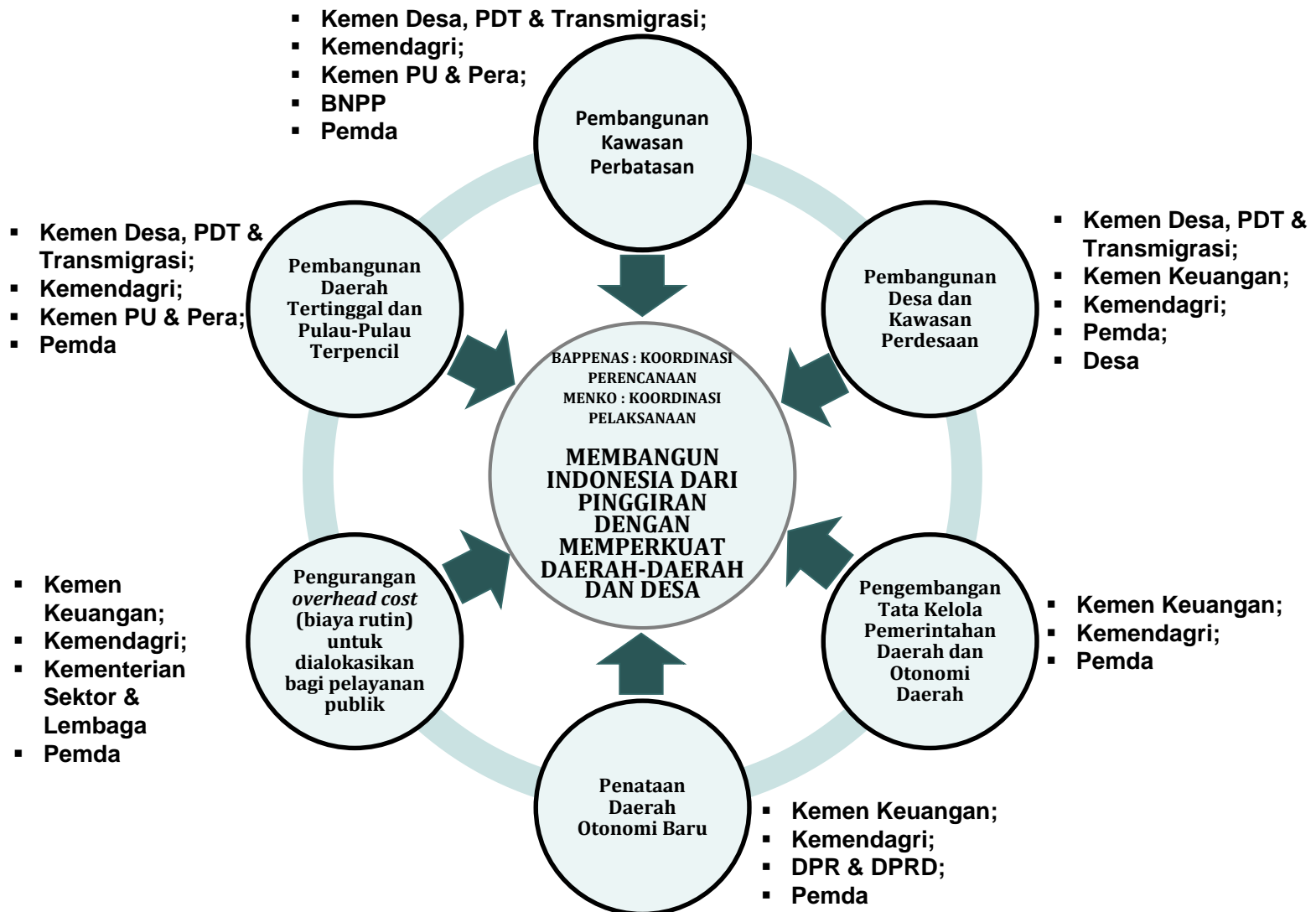
Indikator	2014 (Baseline)	2019
<b>Pembangunan Kawasan Perkotaan</b>		
a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya
c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru

## ARAH KEBIJAKAN:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal.
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.



# Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa





# Perencanaan Pembangunan Wilayah Kalimantan 2015-2019

# Tema Besar Pembangunan Wilayah Kalimantan

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

# Tujuan Strategis

- Tujuan strategis pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
  1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
  2. Penyediaan infrastruktur wilayah,
  3. Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.



# Sasaran

## Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	5.9	6.0	6.2	7.2	7.9
Kalimantan Tengah	6.1	7.0	7.5	8.2	8.7
Kalimantan Selatan	5.0	6.2	6.8	7.6	8.6
Kalimantan Timur	4.5	5.6	5.6	6.4	7.0
Kalimantan Utara	5.0	5.0	6.0	6.4	6.9

# Sasaran

## Tingkat Kemiskinan Wilayah

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	8.7	8.0	7.4	6.8	6.1
Kalimantan Tengah	6.0	5.8	5.3	4.8	4.3
Kalimantan Selatan	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2
Kalimantan Timur	5.1	4.7	4.3	3.9	3.5
Kalimantan Utara	6.7	6.2	5.7	5.1	4.6

# Sasaran

## Tingkat Pengangguran Wilayah

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Tengah	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Selatan	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4
Kalimantan Timur	8.4	8.0	7.6	7.2	6.9
Kalimantan Utara	7.9	7.6	7.2	6.6	6.3

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Barat

## **PERHUBUNGAN DARAT**

1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak

## **PERHUBUNGAN UDARA**

1. Pengembangan Bandara Supadio
2. Pembangunan Bandara Singkawang
3. Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang)

## **PERHUBUNGAN LAUT**

1. Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang)
2. Pengembangan Pelabuhan Pontianak, Pantai Kijing\*
3. Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar

## **JALAN**

1. Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap
2. Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang
3. Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku - Merbau - Temajok
4. Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantan - Galing - Aruk
5. Pembangunan Jembatan Tayan
6. Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng



# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Barat

7. Pembangunan Jembatan Kapuas II
8. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak
9. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung
10. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang
11. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim
12. Pembangunan Jalan RASAU - SEPULAU

## **ASDP**

1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kemboja\*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete\*
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Durian\*

## **KETENAGALISTIKAN**

1. PLTU Kalbar-1 200 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW
3. PLTG/MG Pontianak Peaker-1 100 MW

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Barat

4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
5. Pembangunan PLTS Komunal dan PLTMH

## **Telekomunikasi dan Infomatika**

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

## **SUMBER DAYA AIR**

1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo Bengkayang
2. Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Kota Pontianak
3. Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning Kota Pontianak Kota Pontianak
4. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kota Sintang Kab Sintang
5. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu
6. Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak
7. Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu
8. Peningkatan kapasitas Waduk Panepat ( 10 Ha) Kota Pontianak
9. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Barat

10. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu

## **PENDIDIKAN**

1. Peningkatan pelayanan pendidikan daerah perbatasan dan pulau (dalam bentuk sekolah berasrama).
2. Pembangunan Politeknik di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sanggau.

## **KESEHATAN**

1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (difokuskan untuk 10 kabupaten tertinggal dan daerah perbatasan)
2. Pemenuhan tenaga medis
3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar
4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang)
5. Pengendalian penyakit HIV dan AIDS
6. Penanggulangan gizi buruk

# Terima Kasih

